



**Sosialisasi Konsep Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah*
Melalui Media di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah**

Muhammad Salisul Khakim ✉¹, Medi Trilaksono Dwi Abadi ✉²

Informasi artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah Artikel : Diterima November 2018 Revisi Desember 2018 Dipublikasikan Januari 2019</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi media di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah dalam mensosialisasikan konsep negara Pancasila dalam sudut pandang Muhammadiyah, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Secara spesifik, sosialisasi ini bermaksud untuk membangun persepsi masyarakat terkait konsep “Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam di media-media sosial dan pendidikan, seperti Suara Muhammadiyah, Televisi Muhammadiyah, radio Muhammadiyah, termasuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Data sekunder diperoleh dengan mencari studi literatur berupa buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan hubungan integrasi organisasi ini dengan negara Indonesia. Lokasi penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena merupakan pusat gerakan-gerakan Muhammadiyah dan merupakan representasi wilayah dari skala nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi tidak dijalankan secara terstruktur, namun setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh media di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah tersebut mengandung unsur pembangunan kesejahteraan negara di berbagai aspek kehidupan, yang merupakan bagian dari konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah.</p>
<p>Keywords : <i>Socialization</i> <i>Muhammadiyah</i> <i>State Pancasila</i> <i>Darul Ahdi Wa Syahadah</i></p>	<p>ABSTRACT <i>Socialization of the Pancasila State Concept as Darul Ahdi Wa Syahadah through Media at the Persyarikatan Muhammadiyah. This study aims to explain the media strategy in the Muhammadiyah community environment in disseminating the concept of the Pancasila state in the Muhammadiyah perspective, which is in line with Islamic values and does not conflict with the Pancasila ideology. Specifically, this socialization intends to build public perception regarding the concept of "Pancasila State as Darul Ahdi wa Syahadah". This study uses a qualitative approach, with primary and secondary data sources. Primary data is obtained by conducting observations and in-depth interviews on social media and education, such as Suara Muhammadiyah, Television Muhammadiyah, Muhammadiyah radio, including Muhammadiyah Higher Education and Muhammadiyah Central Leadership. Secondary data was obtained by looking for literature studies in the form of books, journals, and other documents related to the relationship of integration of this organization with the Indonesian state. The location of this research was conducted in the Special Region of Yogyakarta, because it was the center of the Muhammadiyah movements and was a regional representation of the national scale. The results of this study indicate that socialization is not carried out in a structured manner, but every activity carried out by the media in the Muhammadiyah community environment contains elements of state welfare development in various aspects of life, which are part of the Pancasila State concept as Darul Ahdi wa Syahadah</i></p>
<p>How to Cite : Muhammad Salisul Khakim & Medi Trilaksono Dwi Abadi. (2019). Sosialisasi Konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah melalui Media di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, 4(1), pp. 1-11. DOI: http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v4.n1.2019.pp1-11</p>	<p>✉ Alamat korespondensi: Universitas Aisyiyah Yogyakarta</p> <p>✉ E-mail: salisul.khakim@gmail.com¹; muhammad.salis@unisayogya.ac.id²</p>

PENDAHULUAN

Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam yang modernis perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat Indonesia yang bersifat multikultural, dengan tujuan untuk membangun perspektif dari nilai-nilai religius yang terintegrasi dengan ideologi negara. Organisasi ini memiliki peran dan pengaruh besar dalam sejarah perkembangan dan pembangunan bangsa Indonesia sejak sebelum merdeka hingga sampai saat ini, namun identitas Muhammadiyah perlu ditegaskan agar tetap konsisten seiring dengan perkembangan zaman dan banyak pengaruh kepentingan yang masuk ke dalam persyarikatan tersebut.

Muhammadiyah dalam menghadapi permasalahan tersebut perlu menegaskan bahwa persyarikatan yang sudah berdiri lebih dari satu abad tersebut memiliki integritas yang kuat dalam membangun bangsa, yang ditunjukkan pada Muktamar Muhammadiyah pada tahun 2015 lalu yang mengusung konsep “Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah”. Integritas Muhammadiyah menunjukkan bahwa jati dirinya menjadi bagian dari ideologi bangsa yang masih diyakini hingga sampai saat ini, bahkan sikap persyarikatan ini terus melaksanakan perannya sebagai gerakan yang ingin mencapai cita-cita negara Indonesia, dengan mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur.

Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini dapat dilihat dari kurangnya pemahaman masyarakat yang menyatakan bahwa ideologi Pancasila di negara multikultural ini memiliki pemikiran yang sama dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam hal ini Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam penting untuk terlibat dalam membangun kesadaran masyarakat. Organisasi ini telah membuat kebijakan terkait negara Pancasila yang sejalan dengan paham pergerakan organisasi, namun masih perlu membuat strategi dalam melakukan manajemen komunikasi sebagai upaya untuk melakukan sosialisasi yang dapat membangun persepsi masyarakat, baik yang beragama Islam maupun tidak.

Sosialisasi tersebut perlu dilakukan sebagai upaya Muhammadiyah dan masyarakat Islam untuk mewujudkan rekonsiliasi gerakan pembaruan, sehingga menciptakan kondisi yang dinamis dalam pemerintahan demokrasi di Indonesia. Effendy (2011: 195) menjelaskan bahwa dalam perspektif rekonsiliasi gerakan pembaruan, pernyataan-pernyataan intelektual

aliran transformasi sosial lebih kompleks dan karenanya juga lebih sulit dipaparkan. Kompleksitasnya terletak pada pilihan agenda yang bercorak populis dan berorientasi kepada masyarakat. Kompleksitas juga terletak pada nada politisnya yang tampak mengarah kepada pembentukan masyarakat yang kuat vis a vis negara, dan tidak sekadar diarahkan kepada proses rekonsiliasi politik antara Islam dan negara.

Muhammadiyah sebagai organisasi yang modernis dan reformis juga perlu memperjelas integritas jati dirinya sebagai persyarikatan yang tidak berseberangan atau bertentangan dengan identitas dasar negara, terlebih lagi dalam maksud untuk membuat negara berdasarkan syariat Islam. Muhammadiyah dinilai berada pada posisi kaum intelektual muslim yang bersifat nasionalis, artinya lebih kepada pembangunan identitas Islamic society dan bukan pembangunan Islamic state.

Permasalahan di atas tidak hanya merupakan representatif dari masalah yang ada dalam persyarikatan Muhammadiyah, namun juga merupakan permasalahan yang bersifat nasional, karena masyarakat muslim terutama yang memiliki pemikiran sejalan dengan ideologi Muhammadiyah memiliki andil besar dalam proses berbangsa dan bernegara. Penyelesaian permasalahan di atas bukan hanya tanggung jawab bagi pimpinan Muhammadiyah saja, melainkan juga setiap anggota dan elemen yang ada dalam persyarikatan Muhammadiyah, bahkan juga termasuk pemerintah yang perlu membuka ruang publik bagi Muhammadiyah sebagai bentuk demokrasi yang turut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Latar belakang di atas menjadi landasan terkait dengan pentingnya penelitian ini dilaksanakan, sehingga dapat menjelaskan identitas Muhammadiyah yang memiliki pemikiran yang terintegrasi dalam berpartisipasi membangun bangsa yang lebih maju dan beradab. Muhammadiyah perlu menegaskan sikapnya dalam berbangsa melalui sosialisasi konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, sehingga peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu “Sosialisasi Muhammadiyah dalam Pembentukan Persepsi Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah”. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa Muhammadiyah sebagai salah satu identitas nasional yang sejalan dengan ideologi negara Indonesia, sehingga terwujud

kondisi dinamis bangsa dengan sistem pemerintahan demokrasi dan bentuk negara kesatuan. Tujuan dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu untuk mengetahui perspektif Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam dalam memandang Pancasila sebagai ideologi, serta memahami dan menganalisa strategi sosialisasi Muhammadiyah dalam membangun persepsi Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah.

Hasil dan rekomendasi penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan peran penting media di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah dalam proses pembangunan kesejahteraan negara. Konsep Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* yang digagas pada Muktamar Muhammadiyah pada 2015 lalu diperlukan untuk memperjelas identitas dan integritas Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara. Masyarakat Muslim (Muhammadiyah) telah memiliki peran besar dalam perjuangan dan pembangunan bangsa sampai saat ini, dan hal inilah yang perlu dijadikan sebagai dasar bagi Muhammadiyah untuk membangun persepsi masyarakat Indonesia.

Sejarah dan perkembangan bangsa Indonesia telah banyak dibentuk dari berbagai kalangan atau golongan masyarakat, baik yang memiliki pemikiran nasionalis, islamis, dan komunis/sosialis. Abdillah (2011: 140) berpendapat bahwa dalam sejarah Indonesia kontemporer cendekiawan, termasuk cendekiawan muslim, memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa persiapan kemerdekaan sampai akhir 1950-an hampir semua cendekiawan bahkan ikut dalam kegiatan politik. Karena keterlibatan mereka dalam dunia politik didukung baik oleh faktor internal maupun eksternal dan mereka pun dapat mengekspresikan idealisme mereka dengan bebas, maka keterlibatan mereka itu dinilai sebagai hal yang sangat positif dan bahkan merupakan tuntutan sejarah.

Berkaitan dengan keberlanjutan peristiwa tersebut pada era orde baru, Umar (2016: 12) menjelaskan bahwa krisis ekonomi tahun 1997-1998 memaksa Soeharto untuk turun dari kekuasaannya setelah 32 tahun berkuasa, sekaligus melahirkan krisis hegemoni di Indonesia. Dengan jatuhnya Orde Baru, Pancasila dan UUD 1945 tidak lagi menjadi asas tunggal dan sesuatu yang sakral, kendati masih dipertahankan sebagai dasar negara. Jatuhnya

Orde Baru kemudian melahirkan kontestasi hegemonik baru atas makna Islam. Dengan tidak ada lagi asas tunggal Pancasila, Islamisme kembali mampu menampilkan dirinya di pentas politik nasional.

Politik Islam masuk kembali dengan posisi yang sejajar dengan politik yang digunakan oleh rezim pemerintahan, kedua hal ini menjadi semakin kuat dengan masuknya para tokoh-tokoh muslim yang juga memegang kekuasaan, namun bukan maksud untuk menjatuhkan ideologi yang sudah lama dijadikan dasar negara. Effendy (2011: 182) mengungkapkan bahwa pandangan intelektual muslim aliran pembaruan teleologis, memandang Islam tidak boleh berdiri dalam posisi yang berhadap-hadapan dengan negara. Dalam hal ini, yang khususnya sangat penting adalah tidak menempatkan Pancasila sebagai hal yang bertentangan dengan Islam. Melainkan, keduanya harus dipandang sebagai saling melengkapi. Pandangan khusus ini tumbuh dari pemahaman religio-politik bahwa tiap sila dalam Pancasila (kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial) sejalan dengan ajaran-ajaran Islam.

Muhammadiyah menurut Nashir (2007: 20-21) dapat dikatakan juga memiliki pemahaman intelektual muslim yang mengarah pada pembaruan, yang bersifat reformis dan modernis, sehingga persyarikatan ini mendukung penuh Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman bagi warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi Muhammadiyah memerlukan kristalisasi dalam substansinya, yakni memahami kandungan isi ideologi tersebut, setelah itu dilakukan usaha-usaha untuk mensosialisasikan dan menanamkannya dalam kesadaran dan alam pikiran seluruh anggota, dan lebih jauh lagi menjadikan sebagai landasan idealisme, pemikiran, dan langkah dalam seluruh gerak Muhammadiyah secara kelembagaan.

Nashir (dalam Materi Revitalisasi Ideologi, Tanwir I 2007: 22-23) mengungkapkan bahwa revitalisasi ideologi Muhammadiyah diperlukan karena secara faktual terdapat masalah-masalah yang bersifat ideologis. Pertama, yaitu karena melemahnya pemahaman mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam berbagai aspek yang mendasar sehingga kehilangan arah dan komitmen dalam ber-Muhammadiyah. Kedua, gejala melemahnya spirit, militansi, identitas, dan visi gerakan pada bagian anggota persyarikatan.

Ketiga, gejala menurunnya ketaatan dan komitmen pada misi, pemikiran, kebijakan, dan kepentingan Muhammadiyah. Keempat, melemahnya solidaritas kolektif yang ditandai kurangnya ukhuwah, silaturahmi, dan sinergi antar anggota. Kelima, menguatnya tarikan dan kepentingan politik yang masuk ke lingkungan persyarikatan. Keenam, kecenderungan sebagian anggota Muhammadiyah lebih mengutamakan kiprahnya untuk membesarkan organisasi, usaha, dan kegiatan lain di luar Muhammadiyah yang menyebabkan tidak sebandingnya jumlah anggota yang berkiprah untuk persyarikatan serta kurang tergarapnya usaha-usaha persyarikatan secara optimal. Ketujuh, semakin mudahnya berbagai paham pemikiran dari luar yang masuk ke dalam Muhammadiyah yang dapat melemahkan karakter khusus Muhammadiyah ketika tidak diiringi dengan peneguhan ideologis yang menyangkut paham dan sistem perjuangan Muhammadiyah.

Penelitian lain yang berkaitan dengan kajian ini di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Bayuni (2010: 60), yang memandang bahwa Muhammadiyah pada awal sejarahnya membawa misi mempersiapkan masyarakat Muslim di tanah air menyongsong kehidupan modern/urban. Ia merupakan kekuatan progresif tapi tidak radikal dalam tindakan, walaupun pemikiran-pemikirannya mungkin dianggap revolusioner untuk ukuran saat itu. Ia menjalankan misi perubahan bukan melalui revolusi fisik atau mengandalkan kekerasan, melainkan melalui gerakan dakwah dan pendidikan. Muhammadiyah sebagai organisasi yang berorientasi pada agenda-agenda pembaruan, menurut Muhtadi (2010: 52) sejatinya selalu meninjau ulang rumusan ajaran Islam, baik dalam wilayah *mahdallah* maupun *ghair mahdallah*. Peninjauan ulang ini dimaksudkan untuk menakar relevansi serta kesanggupan para pemeluk Islam untuk melaksanakan setiap tuntutan ajaran sesuai dengan realitas yang dihadapi.

Perkembangan zaman yang tidak bisa dihindari menjadi realitas sekaligus tuntutan bagi setiap individu untuk dapat selalu beradaptasi terhadap perubahan, yang perlu diaktualisasikan tanpa menghilangkan nilai atau ajaran Islam secara murni dan sikap organisasi Muhammadiyah yang reformis. Salah satu bidang utama yang seharusnya menjadi *strategic themes* dari pembaruan di tubuh Muhammadiyah di masa mendatang, menurut Sudhamek (2010:

66-67) adalah bidang pendidikan, dengan merawat semua yang telah ada dan dibesarkan. Hanya saja kiprah di bidang pendidikan tidak cukup hanya menekankan pada sisi akademis (*academic excellence*) tapi juga pada saat yang bersamaan sebuah lembaga pendidikan itu harus juga mengembangkan aspek karakter dari anak didiknya (*character building*). Pendidikan itu perlu dipandang sebagai sebuah industri yang harus dikelola dengan profesional dan dengan paradigma baru. Dengan demikian, perlu dikembangkan sebuah kurikulum dan metodologi yang pas dan sesuai untuk memastikan dua aspek tersebut tergarap secara sekaligus.

Nashir (2014: 61-62) berpendapat bahwa ideologi Muhammadiyah memiliki karakter reformis modernis dan Islam yang berkemajuan, yaitu perpaduan antara pemurnian dan pengembangan yang bersifat tengah atau moderat dalam meyakini, memahami, dan melaksanakan ajaran Islam, sehingga senantiasa aktual dan menjadi agama untuk peradaban. Ideologi ini memadukan nilai-nilai Islam yang substantif (esensi, isi) dan wadah (struktur, rukun) antara teks dan konteks, antara pemurnian dan pengembangan; serta menyatukan seluruh dimensi ajaran Islam (aqidah, akhlak, ibadah, dan mu'amalah duniawiyah) ke dalam kesatuan sistem ajaran yang harus diwujudkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Nashir (2014: 65) menegaskan bahwa Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai ideologi negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai hasil konsensus nasional (*dar al-ahdi*) dan lahan berdakwah serta bertajdid (*dar al-syahadah*) sejalan misi utama Muhammadiyah. Hal yang paling penting ialah agar negara Indonesia terus diusahakan selalu dijiwai, dibingkai, dipengaruhi, dan diarahkan oleh nilai-nilai luhur agama sehingga menjadi *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*. Arif dan Aulia (2017: 212) juga berpendapat bahwa Muhammadiyah dan warganya sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki komitmen untuk tetap menjaga *agreement* pendiri bangsa. Komitmen dari Muhammadiyah harus terlibat dalam proses-proses yang berkaitan dengan membangun dan memajukan bangsa, seperti dalam bentuk peran serta melalui kegiatan-kegiatan dalam amal usaha Muhammadiyah, serta terlibat dalam hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakata

METODE

Penelitian ini dimulai dengan melakukan identifikasi permasalahan sosial yang sedang terjadi di masyarakat Indonesia yang multikultural, kemudian dibuat rumusan masalah untuk membuat konsep solusi jawaban atas permasalahan tersebut. Rumusan masalah ini mencoba untuk membangun persepsi masyarakat terkait konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, yang merupakan keanekaragaman identitas nasional yang terintegrasi dengan negara. Hal ini selanjutnya dibandingkan dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada, untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam mencari solusi atas permasalahan tersebut. Tahap penelitian selanjutnya menentukan metode penelitian yang meliputi penentuan lokasi penelitian dan obyek penelitian, serta menentukan model penelitian, teknik pengumpulan data hingga analisis data. Penelitian ini menggunakan model pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit (Moleong, 2012: 6). Pendekatan kualitatif ini dijelaskan dengan metode deskriptif, yang diartikan menurut Nawawi (2012: 67) sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

Model penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan dan wawancara mendalam dengan nara sumber di media-media yang melakukan sosialisasi terkait konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, dokumern terkait dengan gerakan-gerakan Muhammadiyah dalam proses bernegara juga menjadi bagian penting dalam model penelitian kualitatif ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan pada sumber primer dan sekunder, dengan menentukan informan penelitian yang representatif sesuai dengan obyek penelitian yang terkait sosialisasi konsep Muhammadiyah di atas. Menurut Moleong (2012: 157), data utama/primer bersumber dari hasil wawancara dan pengamatan dengan upaya kegiatan melihat,

mendengar dan bertanya, yang dilakukan pada obyek penelitian. Data kedua/sekunder bersumber dari sumber tertulis seperti buku dan majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi terkait dengan sosialisasi yang dilakukan Muhammadiyah dalam membangun persepsi Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah.

Sementara itu, menurut Nawawi (2012:167) menjelaskan bahwa teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian disebut sebagai teknik purposive sampling, yaitu sampel atau informan yang sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan tersebut. Teknik ini menentukan bahwa informan yang menjadi obyek dalam penelitian ini meliputi media-media sosial dan pendidikan, seperti Suara Muhammadiyah, televisi Muhammadiyah, radio Muhammadiyah, termasuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Analisis data, menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip dalam Ulber (2010: 339), mengemukakan bahwa analisis data terdiri dari tiga alur yang terjadi secara bersamaan. Pertama, reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di tangan. Kedua, penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ketiga, menarik kesimpulan, yaitu verifikasi sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama dia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin begitu saksama dengan peninjauan kembali untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif.

Moleong (2012: 330) juga menjelaskan bahwa Triangulasi menjadi cara yang terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi pada waktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Peneliti dapat mengecek kembali temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Muhammadiyah memandang Indonesia dengan persepsi Negara Pancasila sebagai Darul

Ahdi Wa Syahadah. Konsep negara ini secara nasional telah dideklarasikan pada saat Muktamar Muhammadiyah tahun 2015 di Makassar, yang setidaknya mencakup dua hal pernyataan deklaratif. Pertama, Muhammadiyah pada prinsipnya menerima nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila sebagai hasil konsensus atau kesepakatan bersama sebagai dasar negara. Nilai-nilai sila tersebut dipandang tidak bertentangan dengan ideologi Muhammadiyah yang berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, sehingga Muhammadiyah dengan tegas menerima Pancasila sebagai ideologi yang dapat menyatukan seluruh masyarakat bangsa Indonesia yang multikultural.

Kedua, menerima Pancasila sebagai ideologi negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dari hasil konsensus atau kesepakatan nasional (ahdi) dan negara kesaksian (syahadah) atau tempat untuk membuktikan bahwa Muhammadiyah terlibat dalam proses pembangunan negara sejak sebelum merdeka hingga saat ini. Hal lain yang perlu diketahui dalam memandang negara Pancasila juga adalah tujuan negara yang tercermin dalam sila kelima sejalan dengan tujuan Muhammadiyah dalam bernegara, yaitu mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur.

Perumusan dan penerimaan ideologi Pancasila sebagai bagian dasar Negara Indonesia telah berlangsung sejak proses konsensus pada sidang Badan Penyelidik Umum Persiapan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, bahkan proses persaksian dan partisipasi Muhammadiyah juga sudah berlangsung jauh sejak sebelum Indonesia merdeka pada saat berdirinya organisasi tersebut tahun 1912. Namun demikian, deklarasi konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah pada tahun 2015 perlu disosialisasikan untuk mempertegas kembali, sebagai bentuk eksistensi dan keberlangsungan negara Indonesia dengan latar belakang yang beranekaragam suku, budaya, dan agama.

Muhammadiyah (dalam muhammadiyah.or.id) sebagai komponen strategis umat dan bangsa berkomitmen untuk membangun Negara Pancasila dengan cara menggali, mengintegrasikan, mentransformasikan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai luhur keindonesiaan dalam kerangka Islam yang berkembang. Islam yang kemajuan yang menggelorakan misi antiperang,

antiterorisme, antikekerasan, antipenindasan, antiketerbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk pengrusakan di muka bumi.

Konteks terkait dengan hal di atas akan dibahas dalam Pengajian Ramadhan 1437 PP Muhammadiyah, yang akan mengelaborasi lebih dalam dan lebih luas pemikiran tentang Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah dalam perspektif teologis dan ideologis. Pemikiran tentang Negara Pancasila dimaksudkan untuk menjadi rujukan dan orientasi pemikiran serta tindakan bagi seluruh anggota Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara kontekstual berdasarkan pandangan Islam berkemajuan yang selama ini menjadi perspektif keislaman Muhammadiyah.

Sosialisasi ini juga tidak berhenti pada saat Muktamar Muhammadiyah tahun 2015 tersebut, melainkan perlu ditindaklanjuti hingga tingkat daerah dengan ukuran dan indikator-indikator yang jelas. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar warga Muhammadiyah maupun masyarakat umum menyadari bahwa ajaran-ajaran dalam agama Islam sejalan dengan nilai-nilai dalam ideologi Pancasila. Strategi sosialisasi Muhammadiyah dalam membangun persepsi Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah dapat dilaksanakan paling tidak melalui beberapa media seperti berikut:

Suara Muhammadiyah

Isngadi selaku Direktur Eksekutif Suara Muhammadiyah (SM) dalam wawancara penelitian ini mengungkapkan bahwa Islam dan Negara maupun Islam dengan undang-undang sudah selesai sejak zaman dahulu. Saat deklarasi Indonesia merdeka mulai menerima UUD 1945 itu sudah selesai bagi Muhammadiyah, yaitu saat Ki Bagus sudah menerima pembukaan UUD yang sudah seperti yang menggantikan Piagam Jakarta.

Sosialisasi tentang Darul Ahdi wa Syahadah sudah lama dilakukan oleh Suara Muhammadiyah, termasuk sebelum Muktamar Makasar 2015 pun sebenarnya media tersebut sudah merencanakan, namun tanpa mensosialisasikannya secara eksplisit dengan nama Darul Ahdi wa Syahadah. Hal tersebut dapat dilihat dari informasi-informasi yang dipublikasikan terkait dengan proses permasalahan antara fanatisme Islam dan Kenegaraan yang perlu diselesaikan.

Direktur Eksekutif Suara Muhammadiyah ini menjelaskan bahwa medianyaewartakan kegembiraan Muhammadiyah, untuk motivasi

warga Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah memiliki dua strategi sosialisasi umum yang dapat dikaitkan dengan kepentingan sosialisasi materi Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, yaitu Suara Muhammadiyah yang cetak sejak 1915 dan yang online sejak sekitar 2015. Suara Muhammadiyah online berisi relatif bebas, dan lebih banyak berita yang diterbitkan di media cetak.

Dalam wawancara penelitian ini, Isngadi berpendapat: "Sasarannya kalau yang cetak itu kan isi pembacanya para orang-orang Muhammadiyah tradisional, ya orang-orang yang sudah 50 ke atas. Biasanya mereka membacanya dengan cermat dan hati-hati. Kemudian kalau pembaca SM yang online itu lebih beragam, dari orang yang tidak kenal Muhammadiyah, orang yang baru belajar Muhammadiyah, maupun orang Muhammadiyah itu sendiri, tinggal kita sasarannya kemanalah. Sampai sekarang ini ada sekitar yang kita rutin kirim itu sekitar 23.500. Setiap agen itu sudah punya daftar nama sendiri, kasarannya yang sudah pasti sampai ke pembaca itu 23.500 exemplar/setengah bulan, terbit setiap tanggal 1 dan 15 itu yang sudah rutin. Tapi kalau kita cetak rutinnnya itu sekitar 26.300, tetapi kalau ada momentum seperti wisuda bisa lebih. Misalnya UMY wisuda 2000 orang ya berarti kita cetak tambah 2000 eksemplar kita kirim di wisudanya UMY."

Direktur eksekutif SM ini berpendapat bahwa Visi Suara Muhammadiyah berupa peneguhan dan pencerahan serta penggembara. Maksud dari peneguhan adalah teguh dalam keislaman dan kemuhammadiyahannya, sedangkan pencerahan adalah keteguhan yang tercerahkan. Peneguhan sifatnya hanya pada diri sendiri, sedangkan jika hanya pencerahan sifatnya terjebak pada pemikiran bebas. Termasuk dalam Darul Ahdi wa Syahadah yang juga memakai peneguhan dan pencerahan.

Radio Muhammadiyah

Mukti sebagai Direktur Eksekutif Radio Muhammadiyah (RadioMu) mengungkapkan bahwa embrio radio tersebut sudah ada sejak 2008 berada di bawah Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kemudian terus berkembang pada tahun 2012 menjadi resmi masuk di radio streaming. Radio ini menyiarkan peran dan kontribusi Muhammadiyah dalam berproses pembangunan negara di berbagai aspek kehidupan, walaupun tidak selalu eksplisit menjelaskan bahwa yang disiarkan tersebut

sebenarnya berkaitan dengan konsep Darul Ahdi wa Syahadah.

Dalam wawancara penelitian ini, Mukti berpendapat bahwa: "Umumnya berita-berita ter-update ada yang membahas politik juga, tapi kita tetap tidak mendahului apa yang menjadi keputusan persyarikatan Muhammadiyah. Kajian seperti tarjih dan kajian lain 70% kita mengundang setiap minggu itu ada majelis tarjih kita undang Majelis tabligh. Setiap minggu ada gilirannya masing-masing, ekonomi juga, terus yang lebih sering itu Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) Muhammadiyah yang sering sosialisasi edukasi disampaikan di RadioMu."

Radio Muhammadiyah selalu melakukan liputan setiap program kerja Muhammadiyah, seperti Mukatamar dan program kerja rutin lainnya. Setiap majelis juga memiliki rencana kerja nasional, dan menyelenggarakan seminar yang disiarkan secara on air. Liputan khusus lainnya seperti momentum Mukatamar di Makassar tahun 2015 yang mensosialisasikan konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah.

Pihak Radio Muhammadiyah menyatakan bahwa program khusus tentang Darul Ahdi Wasyahadah memang belum ada, tetapi lembaga tersebut mempunyai program Bincang-Bincang Sore. Program tersebut menghadirkan berbagai nara sumber yang berkompeten dalam berbagai aspek kehidupan. Secara tidak langsung, hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk dari Darul Ahdi Wasyahadah, karena sudah merupakan wujud operasional dari ideologi Pancasila, yaitu terutama dalam upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Berikut pernyataan dari Direktur Eksekutif RadioMu tersebut: "Kita jelas kalau untuk narasumber ke pimpinan pusat ya langsung bisa ke narasumber langsung. Kalau kajian tentang Darul Ahdi Wasyahadah secara rutin itu memang belum ada, mungkin ini menarik jadi materi yang harus di angkat kembali untuk mengingatkan khususnya anak muda, bahwa Darul Ahdi Wasyahadah harus dipahami dan disadarkan betul tidak hanya dipahami tetapi harus di internalisasi dalam diri anak muda semua. Selain itu, di operasionalkan Pancasila tersebut dalam keidupan sehari-hari di berbagai bidang, ya ekonomi, di bidang masyarakat yang di masyarakat, sosial masyarakat."

Televisi Muhammadiyah

Televisi Muhammadiyah (dalam laman tvmu.tv) memiliki misi untuk melakukan kontrol sosial yang kritis, santun, bertanggungjawab dan berwawasan luas melalui televisi berkarakter pendidikan dan dakwah yang berbasis Islam yang berkemajuan. Televisi ini menjadi media komunikasi antar warga anak bangsa dalam merajut kebhinekaan dan menjaga nilai-nilai keindonesiaan. Media ini juga menjadi medium yang edukatif, ilmiah, rasional dan relegius serta membentuk kepribadian bangsa, melalui program pendidikan dengan kemasan yang menarik dan mudah dicerna.

Berdasarkan pada misi tersebut, Televisi Muhammadiyah (TVMu) jelas sejalan dengan agenda sosialisasi nilai-nilai kenegaraan dan keagamaan, yang berkaitan dengan konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Televisi yang sudah berdiri sejak 2013 ini juga memiliki program-program yang berupaya mengusung konsep kenegaraan dan keagamaan yang sejalan.

Program-program dalam televisi ini di antaranya adalah Program Islam berkemajuan, yang mensosialisasikan nilai-nilai Islam yang modernis dan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Acara yang pernah ditayangkan dalam program ini di antaranya adalah talk show yang berjudul Peran Muhammadiyah dalam Pendidikan di Tanah Air, Hukum Pidana dalam Islam, Membangun Persatuan Umat, Kerukunan antar Umat Beragama, dan lain sebagainya.

Program lain yang ada dalam Televisi Muhammadiyah yang ikut serta dalam mensosialisasikan konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah adalah Program Indonesia Berkemajuan. Acara yang pernah ditayangkan dalam program ini adalah talk show yang berjudul Faktor Watak yang Menunjang Kemajuan Bangsa, dan Faktor Agama Untuk Kemajuan Bangsa.

Program Pengajian Bulanan juga menjadi agenda kegiatan dalam Televisi Muhammadiyah, dan juga sejalan dengan agenda sosialisasi konsep Negara Pancasila, walaupun memang tidak memiliki strategi dan rencana yang khusus untuk mensosialisasikan konsep tersebut. Pada program ini pernah menayangkan kajian yang berjudul Islam, TNI dan Kedaulatan Bangsa pada 6 Oktober 2017 yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Majlis Diktilitbang

Sosialisai terkait Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah dinilai penting bagi Arsyad selaku pimpinan dalam Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam wawancara penelitian ini Arsyad mengungkapkan bahwa: "Sosialisasi ini saya kira penting. Tapi Kami bekerja tidak berdasarkan itu, karena kita menyusun sejak awal itu dasarnya Mukhtamar, apa yang harus dilakukan Majelis. Fokus kami lebih pada akademik. Kalau yang ideologis itu ada pada MPK (Majelis Pendidikan Kader), yang lebih banyak menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Saya kira Majelis Pendidikan Karakter (MPK) itu berkewajiban untuk mensosialisasikan, kader kan MPK masih pendidikan kader. Justru mereka yang harusnya. Ketika kaderisasi pelatihan-pelatihan itu, mereka menyampaikan itu."

Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan mengungkapkan belum pernah secara khusus menerima pelimpahan kewenangan untuk menyampaikan konsep Darul Ahdi wa Syahadah hasil dari Mukhtamar. Pihak Diktilitbang menyampaikan bahwa yang biasa dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu Haedar (Ketua Umum PP Muhammadiyah) yang berceramah untuk menjelaskan ke PTMA tentang Darul Ahdi Wasyahadah itu. Pihaknya juga menyatakan tidak ada rencana strategi secara khusus untuk mensosialisasikan konsep Negara Pancasila tersebut.

Pimpinan Majelis Diktilitbang ini berpendapat bahwa: "Strategi sosialisasi belum ada, dan belum terfikirkan, karena memang hasil Mukhtamar itu hanya keputusan, tidak ada permintaan khusus untuk mensosialisasikan itu. Ketika Pak Haedar itu ceramah mungkin asumsinya wis do ngerti, padahal tidak. Bahwa bentuk Negara kita sekarang ini bentuk yang terakhir, yang kita terima itu tidak ada yang tahu, ya kalau pengurusnya kita tahu."

Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan berpendapat bahwa materi seperti Al-Islam Kemuhammadiyah (AIK) merupakan suatu bentuk rekomendasi, dan Darul Ahdi wa Syahadah ini mungkin dapat dimasukkan dalam kurikulum AIK tersebut. Pada sisi lain, Majelis ini juga menyatakan sedang dalam proses menerbitkan buku, namun tidak secara spesifik untuk mensosialisasi Darul Ahdi wa Syahadah. Bahkan Majelis ini akan membuat buku AIK yang khusus untuk orang

Indonesia Timur yang non Islam, karena sasarannya adalah untuk semua, yaitu agar orang non Muslim juga mengetahui arah pergerakan Muhammadiyah.

Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai materi ini penting untuk disosialisasikan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah, dan berharap materi ini juga dapat ditindak lanjuti oleh pimpinan perguruan tinggi terkait untuk memasukkannya dalam kurikulum pembelajaran. Pada waktu acara Baitul Arqam, pihak Diktilitbang menilai bahwa materi ini harus disampaikan, karena banyak di lingkungan perguruan tinggi yang sudah mengarah ke paham radikal. Secara ilmiah, konsep tentang negara versi Yunani, Republik, bahkan konsep negara menurut Islam tersebut bisa dipelajari sebagai uswatun khasanah pengetahuannya, namun jangan sampai memaksakan untuk menjadi Negara Islam. Pimpinan Majelis Diktilitbang ini berpendapat bahwa: "Saya kira dengan ide ini mungkin perlu, tapi paling kami minta ke rektor. Kalau dari Majelis enggak ada orangnya, paling menginstruksikan ke rector untuk mengenalkan konsep Darul Ahdi Wasyahadah kepada mahasiswa terutama ketika masuk mahasiswa baru. Nah, mahasiswa baru itu penting."

Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) sebagai basis terbesar dalam organisasi masyarakat Islam memegang peranan penting dalam menjaga dinamika ketahanan nasional dari radikalisme. Perguruan tinggi ini berdasarkan pada nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyah, sehingga arah orientasi lulusan mahasiswanya mengarah pada basis paham berdasarkan nilai-nilai tersebut. Namun demikian, Muhammadiyah sebagai pihak pengelola dari satuan pendidikan tersebut memiliki visi dan misi yang sejalan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan negara yang baik, adil dan sejahtera.

Perguruan tinggi yang merepresentasikan dalam hal ini adalah perguruan tinggi yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang meliputi tiga universitas yang akan dijelaskan lebih lengkap di bawah. Pada prinsip argumentasi yang disampaikan pada saat wawancara dari tiga universitas tersebut dapat dikatakan telah mewakili dalam Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah seluruh Indonesia, karena secara struktural masih berada

di bawah Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Rifandi selaku kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni UNISA dalam wawancara di penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam konteks keislaman dan keindonesiaan, radikalisme menjadi ancaman karena konsensus negara Indonesia sendiri berdasarkan pada Pancasila dan tidak berdasarkan pada basis salah satu agama. Dalam proses pembelajaran penting bagi mahasiswa untuk memahami nilai kemuhammadiyah. Dalam hal ini, persoalan yang ditanamkan adalah lebih pada konteks pemahaman dan pemikiran Islam, fiqih, aqidah, dan akhlak. Perguruan tinggi ini memberikan pemahaman kebangsaan pada saat Masa Taaruf (MATAF), termasuk pemahaman pencegahan perilaku menyimpang pada umumnya, dengan penerimanya yang langsung disampaikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 dan 2018 ini.

Pemahaman penting bagi mahasiswa terkait nilai kenegaraan dan keagamaan agar dapat memaknainya dalam proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perguruan tinggi menjadi media pembelajaran yang penting, yang tidak hanya mengajarkan pengaruh Islam dalam membangun negara, melainkan juga proses penerimaan masyarakat Muslim terhadap Pancasila. Organisasi-organisasi internal seperti HIMA Prodi, IMM dan BEM menjadi media untuk mensosialisasikan nilai-nilai keislaman dan kenegaraan. Sementara itu, dari pihak LPPI UNISA juga ikut menanamkan nilai keagamaan yang ideal, penerimanya juga dari alumni Lemhamnas maupun dari tokoh-tokoh yang memiliki keahlian/kepakaran dalam bidang tersebut.

Proses pembelajaran di UNISA juga meliputi materi Darul Ahdi wa Syahadah, yaitu terdapat dalam materi perkuliahan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diberikan pada mahasiswa saat awal perkuliahan. Materi tersebut disampaikan pada pertemuan kedua dengan topik Sejarah Pancasila dan Darul Ahdi wa Syahadah. Topik ini berisi tentang proses pembentukan negara Indonesia, perumusan Pancasila sebagai dasar negara, hingga keterlibatan Muhammadiyah pada saat perjuangan sebelum kemerdekaan, perumusan Pancasila, kontribusinya dalam membangun bangsa hingga saat sekarang.

Setyono selaku Kepala Bidang Kemahasiswaan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) berpendapat bahwa di perguruan tingginya tidak ada Lembaga Dakwah Kampus kecuali di bawah IMM.

Kepala bidang kemahasiswaan UAD berpendapat dalam wawancara penelitian ini bahwa "Kita mengajak para mahasiswa untuk berdiskusi bersama dan melihat fakta yang ada dengan berbagai pemikiran, dengan adanya ruang ini mahasiswa akan dapat memahami hal yang terjadi. Ruang diskusi yang diadakan itu sering dengan tema umum, termasuk kajian keagamaan rutin yang berperan aktif, baik untuk kepentingan perguruan tinggi sendiri maupun untuk masyarakat umum."

Prinsip sosialisasi terkait konsep Darul Ahdi wa Syahadah di UAD juga sama dengan di UNISA, di perguruan tinggi ini juga memiliki kebijakan kemahasiswaan yang diberikan kepada mahasiswa. Mahasiswa baru yang masuk UAD mengikuti kegiatan Program Pendidikan Karakter (P2K) dan Masa Taaruf (MASTA) sebagai pembekalan tentang keorganisasian di kampus maupun persiapan di dunia kerja. Hal ini tentu menjadi momen untuk menanamkan nilai-nilai keislaman dan kenegaraan kepada para mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.

Kepala Divisi Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang dipimpin oleh Johari, mengungkapkan bahwa di negara ini kebebasan untuk mengungkapkan identitas agama itu bebas pasca reformasi, sehingga tumbuh subur di Indonesia. Pihak kemahasiswaan di UMY melakukan pembinaan terstruktur kepada mahasiswa, yaitu melalui Divisi Pengembangan minat dan Bakat Mahasiswa di bawah Wakil Rektor 4 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Al-Islam Kemuhammadiyah.

Mahasiswa UMY mengikuti perkuliahan ketika masuk dengan Orientasi Dasar Studi Islam (OSDI), dalam pertemuan tersebut terdapat sosialisasi terkait pengenalan Islam yang damai menurut Muhammadiyah yang juga berkembang. Selain itu dalam satu semester kemudian juga terdapat Kajian Intensif Agama Islam yang melibatkan seluruh mahasiswa selama dua hari.

Program-program yang ada di UMY sama dengan dengan program di perguruan tinggi lainnya, yaitu pada Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPi) di bawah Wakil Rektor 4 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Al Islam Kemuhammadiyah yang selaras

dengan Islam yang berkembang, termasuk kajian-kajian di dalamnya.

Lembaga kemahasiswaan maupun lembaga keagamaan dalam perguruan tinggi ini memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai dan konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Hal ini karena secara praktis dapat langsung diterima dan dimanfaatkan secara langsung oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memahaminya dengan mudah.

Perguruan tinggi ini juga pernah menjadi media penyelenggaraan pengajian yang mengangkat tema "Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah: Perspektif Teologis dan Ideologis" pada tanggal 9 hingga 11 Juni 2016. Berdasarkan pada laman muhammadiyah.or.id, kajian tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan acuan yang komprehensif tentang transformasi nilai-nilai Pancasila, sehingga menjadi rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasar pandangan Islam yang berkembang. Tujuan lainnya adalah untuk mengembangkan wawasan warga Muhammadiyah sebagai komponen strategis bangsa dalam menghadapi tantangan yang kompleks di tengah dinamika umat, bangsa dan perkembangan global. Materi yang disampaikan pada kajian tersebut adalah nilai-nilai Pancasila dalam pandangan Islam, negara Pancasila sebagai perwujudan Darus Salam, transformasi nilai Ketuhanan dalam kehidupan bernegara, transformasi nilai kemanusiaan dan persatuan dalam kehidupan bernegara, serta transformasi nilai kerakyatan dan keadilan sosial dalam bernegara.

SIMPULAN

Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam memandang bahwa ideologi Pancasila sejalan dengan nilai-nilai dalam agama Islam, serta sejalan dengan paham Muhammadiyah. Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai ideologi negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai hasil konsensus nasional dan negara persaksian untuk terlibat dalam proses pembangunan negara yang sejahtera, adil dan beradab.

Muhammadiyah menilai penting untuk mensosialisasikan konsep Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* tersebut, baik secara tertulis, lisan, visual, maupun dalam bentuk ideologis dan praktis secara langsung. Sosialisasi dalam skala nasional pernah disampaikan pada saat Mukhtamar

Muhammadiyah pada tahun 2015. Sosialisasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh organisasi-organisasi otonom yang berada di bawah Muhammadiyah, seperti Suara Muhammadiyah, Televisi Muhammadiyah, Radio Muhammadiyah, serta Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan.

Strategi sosialisasi konsep negara ini tidak secara eksplisit dilakukan oleh Muhammadiyah, seperti perumusan program kegiatan yang sistematis dan masif, melainkan sosialisasi tersebut berjalan dengan sendirinya tanpa ada arahan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada organisasi-organisasi otonom yang berada di bawahnya. Namun demikian, pada prinsipnya setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah mengandung unsur pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan kesejahteraan bangsa dan negara dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga itu dapat merupakan konsep Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. 2011. *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Adam dan Mona. 2016. *Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah: Kolaborasi Pemikiran Pancasila sebagai Darul 'Ahdi Wa Syahadah*. Diunduh dalam [http://www.muhammadiyah.or.id/id/news/print/6236/pengajian-ramadhan-pp-muhammadiyah--kolaborasi-pemikiran-pemikiran-](http://www.muhammadiyah.or.id/id/news/print/6236/pengajian-ramadhan-pp-muhammadiyah--kolaborasi-pemikiran-pemikiran)
- Arif, Didik B. dan Aulia, Syifa S. (2017). Studi tentang negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah untuk penguatan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan. *Jurnal Civics*. 14(2), 206-217.
- Bayuni, Endi. (2010). Muhammadiyah, antara Gerakan Progresif atau Konservatif. *MAARIF*, 5(1), 54-60.
- Effendy, Bahtiar. 2011. *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Democracy Project.
- Moleong, L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhtadi, Asep. (2010). Menakar Gerakan Pembaruan Muhammadiyah. *MAARIF*, 5(1), 43-53.
- Nashir, Haedar. 2007. *Kristalisasi Ideologi dan Komitmen Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nashir, Haedar. 2014. *Ideologi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sudhamek. (2010). Tantangan dan Rejuvenasi Peran Strategis Muhammadiyah. *MAARIF*, 5(1), 61-70.
- Ulber, Silalahi. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditaman.
- Umar, Ahmad R. M. (2016). Dari 'Negara Islam' ke Politik Demokratis: Wacana dan Artikulasi Gerakan Islam di Mesir dan Indonesia. *Jurnal Masyarakat & Budaya*. 18(1), 1-18.
- _____. 2018. *Islam yang Berkemajuan*. Diunduh dalam <http://tvmu.tv/genre/islam-yang-berkemajuan/>